

ABSTRAK

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan instrumen kebijakan pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Meskipun secara normatif dirancang untuk memperluas inklusivitas hunian, implementasinya kental oleh dinamika politik berupa kontestasi kekuasaan dan kepentingan antaraktor. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana asimetri kekuasaan dan kepentingan antaraktor dalam jaringan kebijakan FLPP membentuk pola distribusi manfaat serta implikasinya terhadap keadilan distribusi bagi kelompok sasaran. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada implementasi FLPP periode 2024-2025 di Provinsi Jawa Barat, analisis penelitian ini mengintegrasikan kerangka *Politics of Policy Implementation* dari Merilee S. Grindle, konsep *power-interest positioning* dari Thompson dan Martin, serta konsep *distributive justice* dari Deborah Stone.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan yang signifikan dalam jaringan kebijakan. Aktor berkategori *High Power-High Interest* seperti Kementerian PKP, BP TAPERA, dan perbankan komersial memiliki kendali hegemonik dalam regulasi, alokasi anggaran, serta penapisan manfaat. Sebaliknya, kelompok sasaran utama seperti MBR sektor informal (*non-fixed income*) dan UMKM konstruksi berada pada posisi *Low Power-High Interest* sehingga rentan mengalami eksklusi struktural dan marginalisasi. Penelitian ini menemukan terjadinya *principle-outcome mismatch* dan *policy paradox*, di mana distribusi manfaat FLPP bergeser dari prinsip kebutuhan (*need*) menjadi berbasis kelayakan finansial (*desert*) kaku yang memprioritaskan kelompok pekerja formal berpendapatan tetap. Dengan demikian, studi ini menunjukkan bahwa implementasi FLPP bertransformasi menjadi arena politik tempat relasi kekuasaan dan dominasi kepentingan antaraktor berperan mutlak dalam menentukan siapa yang memperoleh akses, manfaat, dan posisi dalam kebijakan perumahan nasional.

Kata Kunci: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), implementasi kebijakan, *power-interest networks*, keadilan distributif, *policy paradox*, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

ABSTRACT

The Housing Financing Liquidity Facility (FLPP) program is a government policy instrument providing subsidized housing finance for Low-Income Communities (MBR). Although normatively designed to expand housing inclusivity, its implementation is heavily shaped by political dynamics involving power contests and actor interests. This study analyzes how power asymmetry and interests within the FLPP policy network shape benefit distribution and its implications for distributive justice among target groups. Utilizing a qualitative case study of FLPP implementation (2024–2025) in West Java Province, this research integrates Merilee S. Grindle’s *Politics of Policy Implementation*, Thompson and Martin’s *power-interest positioning*, and Deborah Stone’s *distributive justice*. Data were collected via in-depth interviews, documentation, and literature reviews. The results reveal a significant power imbalance within the network. *High Power-High Interest* actors, the Ministry of PKP, BP TAPERA, and commercial banks-exert hegemonic control over regulations, budget allocations, and benefit vetting. Conversely, primary target groups like informal sector MBR (*non-fixed income*) and construction MSMEs occupy a *Low Power-High Interest* position, leaving them vulnerable to structural exclusion and marginalization. The study identifies a *principle-outcome mismatch* and a *policy paradox*, where benefit distribution shifts from a *need*-based principle to a rigid, *desert*-based financial eligibility standard that privileges formal workers with fixed incomes. Ultimately, FLPP implementation transforms into a political arena where power relations and interest dominance dictate who gains access, benefits, and positioning in national housing policy.

Keywords: Housing Financing Liquidity Facility (FLPP), policy implementation, *power-interest networks*, distributive justice, *policy paradox*, Low-Income Communities (MBR)